

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritik vonis Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 923 K/Pid/2023 terkait tindak pidana kelalaian pada peristiwa kerusuhan massal pertandingan sepak bola di Malang dengan menggunakan perspektif asas proporsionalitas. Permasalahan yang dikaji meliputi kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta penerapan asas proporsionalitas dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas, khususnya dalam menilai keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan. Selain itu, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan ketidaksesuaian antara fakta hukum dan pertimbangan yuridis yang digunakan dalam putusan. Penerapan asas proporsionalitas dalam kasus ini dinilai belum optimal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum pidana.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut masih memerlukan kritik dari perspektif asas proporsionalitas agar dapat mencerminkan keadilan yang lebih seimbang. Oleh karena itu, disarankan agar hakim dalam menjatuhkan putusan lebih memperhatikan prinsip proporsionalitas sebagai dasar dalam menentukan sanksi pidana.

Kata kunci: Proporsionalitas, Kelalaian, Pemidanaan, Kanjuruhan, Putusan Hakim

ABSTRACT

This study aims to critically analyze the Supreme Court's decision in Case Number 923 K/Pid/2023 concerning the criminal offense of negligence arising from the mass riot incident during a football match in Malang, from the perspective of the principle of proportionality. The issues examined include the appropriateness of the judges' considerations in rendering the verdict and the application of the principle of proportionality in the case. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches, which are analyzed qualitatively based on primary and secondary legal sources.

The results indicate that the judicial considerations in the decision have not fully reflected the principle of proportionality, particularly in assessing the balance between the degree of fault and the sanctions imposed. Furthermore, several aspects reveal inconsistencies between the established legal facts and the juridical reasoning applied in the ruling. The implementation of the proportionality principle in this case is therefore considered suboptimal, potentially leading to injustice in criminal law enforcement.

This study concludes that the Supreme Court's decision in the case warrants critical evaluation from the perspective of the principle of proportionality, as the imposed sentence has not fully reflected a balanced sense of justice. Therefore, judges are encouraged to place greater emphasis on the principle of proportionality when determining criminal sanctions, ensuring that the punishment imposed is proportionate to the offender's degree of culpability and responsibility.

Keywords: *Proportionality, Negligence, Sentencing, Kanjuruhan, Judicial Decision*